

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) TERLAKSANA PADA KAMPUNG RENDANG DI KOTA PAYAKUMBUH

¹ Dasatry Dwi Ramadana, ² Asep Ajdin

^{1,2}Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi

Corresponding author: ddasatry@gmail.com

Kota Bukittinggi, 102010, Indonesia

Abstract

The purpose of this research is to understand and analyze the implementation of the One Village, One Product (OVOP) policy in Kampung Rendang, Payakumbuh City, West Sumatra. The thematic analysis method with a qualitative deductive concept was used to identify the driving factors of OVOP policy implementation from the point of view of policy makers and Rendang Small and Medium Industries (SMLs) in the Rendang Village Center. Data collection was conducted through semi-structured interviews. Data processing was done in Nvivo 12 Plus using the saturation technique. The results found that there were 10 factors driving the implementation of OVOP policy from the policymakers and 8 factors driving the implementation of OVOP policy from the SMLs. OVOP policy is the responsibility of the Department of Labor and Industry (Disnakerperin). Disnakerperin has the right to assess the performance of OVOP SMLs and then coordinate it with other responsible parties. Policymakers have provided training, mentoring, promotional platforms, market access, and licensing for Rendang SMLs in the Rendang Village Center. The OVOP policy in Kampung Rendang has generally been successful but still needs to be reviewed for improvement. The research implications emphasize the importance of communication in the substance of a policy. Through communication, it will be easier to mobilize both human resources, information, authority, and the necessary facilities. Bureaucratic structure and disposition also play an important role in determining the success of implementing a policy.

Keywords: Communication; Disposition; OVOP; Policy; Resources

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis implementasi kebijakan One Village One Product (OVOP) di Kampung Rendang Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Metode analisis tematik dengan konsep deduktif kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi faktor pendorong implementasi kebijakan OVOP dari sudut pandang pembuat kebijakan dan Industri Kecil Menengah (IKM) rendang di Sentra Kampung Rendang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur. Pengolahan data menggunakan Nvivo 12 Plus dengan menggunakan teknik saturasi. Hasil penelitian menemukan terdapat 10 faktor pendorong implementasi kebijakan OVOP dari pihak pembuat kebijakan dan 8 faktor pendorong implementasi kebijakan OVOP dari pihak IKM rendang. Disnakerperin berhak menilai kinerja IKM OVOP dan kemudian mengkoordinasikannya bersama pihak yang bertanggung jawab lainnya. Pembuat kebijakan telah memberikan pelatihan, pendampingan, wadah promosi, akses pasar, dan mengurus perizinan untuk IKM rendang di Sentra Kampung Rendang. Kebijakan OVOP di Kampung Rendang secara umum sudah berhasil dilakukan namun masih perlu dikaji ulang untuk penyempurnaan. Implikasi penelitian menekankan pada pentingnya komunikasi dalam substansi sebuah kebijakan. Melalui komunikasi, sumber daya akan lebih mudah untuk digerakkan baik sumber daya manusia, informasi, wewenang dan fasilitas yang diperlukan. Struktur birokrasi dan disposisi juga berperan penting sebagai penentu keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat; Pemerintahan Desa; Petani Rumput Laut; Strategi

PENDAHULUAN

Pengembangan ekonomi lokal menjadi fokus perhatian di berbagai negara, terutama di era globalisasi yang menuntut adanya diversifikasi ekonomi serta peningkatan daya saing di tingkat lokal. Salah satu pendekatan yang telah terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal adalah konsep *One Village One Product (OVOP)* (Murti & Harianto, 2019). Berdasarkan pada dokumen di Kemenperin.go.id, konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 1979 sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Di Indonesia sendiri, OVOP juga diadopsi dengan baik dan Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi yang memperoleh penghargaan OVOP ini dengan melihat pada potensi sumber daya yang banyak.

Terdapat tiga jenis komoditi yang dijadikan sasaran untuk pelaksanaan program OVOP di Provinsi Sumatera Barat yakni, komoditi makanan dan minuman, komoditi kain tenun, dan komoditi anyaman. Dari 15 IKM yang diikutsertakan, lima diantaranya adalah komoditi makanan dan minuman dan rendang menjadi produk IKM yang paling banyak dikembangkan. Terdapat tiga IKM rendang yang masuk dalam program OVOP di Kota Payakumbuh yakni Rendang Riry, Rendang Gadih, dan Rendang Erika. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produk rendang menjadi komoditi yang paling potensial dalam implementasi program OVOP, selain karena rendang menjadi produk makanan yang berasal dari Kota Payakumbuh (Kementerian Perindustrian Indonesia, 2023).

Ratmono, Hendri, dan Yateno (2016) menyebutkan bahwa OVOP bertujuan untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan memasarkan satu produk unggulan yang khas dari setiap desa atau kampung. Produk tersebut mencerminkan keunggulan lokal dan keahlian khas masyarakat setempat. Program ini dirancang untuk mempromosikan potensi industri kecil dan menengah di suatu daerah, memanfaatkan sumber daya lokal dan melestarikan lingkungan. Produk yang dipilih dalam OVOP biasanya inovatif, kreatif dan memiliki nilai tambah yang tinggi, sambil mempertahankan citra lokal yang kuat dan daya saing yang tinggi (Juhari, 2019). Dengan demikian, OVOP tidak hanya berfungsi sebagai strategi ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk melestarikan kearifan lokal, budaya, dan tradisi.

Menurut Fitri (2022), meskipun OVOP telah terbukti berhasil di banyak negara, implementasinya sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Faktor-faktor seperti kurangnya infrastruktur, akses terbatas terhadap pasar, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pengembangan produk lokal sering kali menjadi penghambat dalam pelaksanaan konsep OVOP. Konsep ini mendorong setiap desa atau kampung untuk mengembangkan satu produk unggulan yang mencerminkan keunggulan lokal dan kearifan tradisional masyarakat setempat (Setiajatnika & Astuti, 2022).

Di Indonesia, OVOP telah diadopsi oleh beberapa daerah sebagai strategi untuk meningkatkan ekonomi lokal. Namun, penelitian tentang implementasi dan dampak OVOP di berbagai daerah di Indonesia masih terbatas. Menurut Gani Irwan dan Mutiati (2018), OVOP di Indonesia umumnya adalah IKM yang konsisten menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan terus mendapat bimbingan serta aneka bantuan dari pemerintah. Hal ini berkaitan dengan produk yang dihasilkan mewakili identitas daerah bahkan negara. Dimana produk-produknya mencerminkan keunikan suatu daerah.

Beberapa produk daerah yang menjadi produk OVOP harus memiliki kriteria yang meliputi keunikan khas budaya dan keaslian lokal, mutu, dan tampilan produk, potensi pasar yang terbuka di dalam dan di luar negeri serta kontinuitas dan konsistensi produksi yang didukung sumber daya lokal (Khairul, 2018). Menurut Juhari (2019), dengan keunggulan yang dimiliki, maka produk tersebut dapat meningkatkan pendapatan bagi daerahnya, melalui kunjungan turis, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan keterampilan SDM. Di Indonesia terdapat sekitar 74.000 desa yang memiliki keunikan atau ciri khas. Dimana mayoritas atau sekitar 65% penduduknya masih tergolong miskin, berpendapatan rendah. Dan mayoritas desa-desa tersebut eksis disektor pertanian atau agrikultur. Dengan kultur tersebut, sangat potensial dikembangkan OVOP.

Pemerintah Kota Payakumbuh Berdasarkan dokumen RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kota Payakumbuh tahun 2023-2028 pembangunan perkonomian Kota Payakumbuh telah dirumuskan dalam Misi kedua yaitu "Membangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan gerakan ekonomi bersama". Dalam hal ini jelas disebutkan bahwa pembangunan perekonomian Kota Payakumbuh adalah berbasis ekonomi kerakyatan dan harus muncul sebagai gerakan ekonomi bersama. Untuk itu, Pemerintah Kota Payakumbuh dalam periode RPJMD tahun 2023-2028 ini mendorong pertumbuhan yang tinggi di tiga sektor unggulan kota payakumbuh yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

Dalam konteks Kota Payakumbuh, implementasi OVOP dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkenalkan dan mengembangkan produk-produk khas Minangkabau yang berpotensi untuk menarik minat pasar lokal, nasional, maupun internasional (Tabrani & Angkasa, 2021). Meskipun potensinya besar, implementasi OVOP di Kota Payakumbuh masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya infrastruktur pendukung, keterbatasan akses pasar, serta kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat lokal menjadi beberapa hambatan utama yang perlu diatasi. Untuk memproduksi rendang dengan skala besar membutuhkan teknologi kekinian yang lebih efektif dan efisien. Keberadaan mesin pengolah yang canggih tentu akan memangkas biaya produksi dan lebih efisien di waktu. Ini yang

sebenarnya perlu ditindaklanjuti oleh dinas terkait seperti dinas perindustrian dengan membantu permodalan sarana dan prasarana usaha. Lalu, akses pasar nasional dan global membutuhkan banyak persyaratan yang memang membutuhkan bantuan dari dinas terkait agar dapat menjangkau pasar secara lebih luas. Perizinan usaha, BPOM, halal dan sebagainya dapat mempermudah IKM Rendang untuk menjangkau pasar nasional dan global. Kemudian, keberadaan sentra rendang di Kampung Rendang sepertinya masih belum dapat memberdayakan banyak usaha kecil yang sebenarnya berpotensi untuk berkembang. Dalam penelitian ini digunakan indikator implementasi kebijakan menurut teori Edward III. Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan segala bentuk upaya untuk mendapatkan apa yang menjadi target dari tujuan itu sendiri. Menurut Edward III, implementasi kebijakan akan menjadi efektif apabila ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM), struktur organisasi, komunikasi, serta disposisi atau sikap (Nuriyani & Mia, 2022). Oleh karena itu, penelitian tentang implementasi OVOP di Kota Payakumbuh menjadi penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini dan untuk merumuskan strategi yang tepat dalam mengatasi tantangan yang ada.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (Banks, 2018). Penelitian ini menggunakan metode analisis tematik. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis tematik yang didapatkan dari kodifikasi data primer. Analisis tematik merupakan suatu metode untuk menganalisis, mengidentifikasi, serta melaporkan tema-tema yang terdapat dalam suatu fenomena (Braun & Clarke, 2012). Data primer yang sudah dikodifikasi menggunakan software Nvivo 12 Plus akan dikategorikan berdasarkan tema yang didapat. Tema-tema telah ditentukan dengan merujuk kepada teori yang sudah ada sehingga termasuk kepada pengkodean secara deduktif. Teori implementasi kebijakan menurut Edward III yang terdiri dari empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi digunakan untuk merancang instrumen wawancara berupa skrip wawancara semi-terstruktur. Wawancara merupakan komunikasi yang terjadi secara dua arah dimana peneliti akan menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan pedoman wawancara dan dilakukan dengan lebih leluasa dan tidak terlalu terikat dengan susunan pertanyaan pada pedoman wawancara (Pike, 2019). Wawancara penulis lakukan secara mendalam kepada empat kepala dinas terkait di Kota Payakumbuh yaitu: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin); Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora); Dinas Koperasi dan UMKM (Diskopukm); dan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinpmptsp); serta dua Industri Kecil Menengah (IKM) rendang di Kampung Rendang yaitu Rendang Riry dan Rendang Erika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Jones (1991) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020) Lebih lanjut, menurut Teori implementasi Mirelee Grindle (Grindle, 2017) kemudian digunakan pada dua level: Pertama, akan terlihat secara umum bagaimana implementasi kebijakan yang dikaji menjawab pertanyaan "apa yang terjadi" dan "bagaimana". Grindle mengatakan, proses implementasi kebijakan perlu melihat proses kebijakan hingga tingkat program tertentu dan alokasi pendanaannya; Kedua, untuk membantu menjelaskan temuan tahap pertama yaitu menjawab pertanyaan "mengapa", dilihat bagaimana interaksi proses implementasi dengan hal-hal yang secara umum menurut Grindle menentukan keberhasilan kebijakan yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya. (Ode et al., 2023)

Faktor Pendorong Implementasi Kebijakan OVOP di Kampung Rendang Kota Payakumbuh: Perspektif Pembuat Kebijakan



Gambar 1. Keywords I

Berdasarkan gambar 1, peneliti mendapatkan kata "disnakerperin" sebagai kata yang paling banyak diucapkan oleh informan. Penjabaran komposisi kata-kata yang paling sering diucapkan oleh informan akan disajikan secara lengkap pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Word Count I

Word	Length	Count	Weighted Percentage (%)
Disnakerperin	10	7	24,14
Pelatihan	9	6	20,69
Berhasil	8	3	10,34
Koordinasi	10	3	10,34
Promosi	7	3	10,34
Penilaian	9	2	06,90
Perizinan	9	2	06,90
Akses Pasar	10	1	03,45
Kaji Ulang	9	1	03,45
Sentra Kampung Rendang	20	1	03,45

Sumber: Hasil pengolahan kata menggunakan Nvivo 12 Plus, 2024

Tabel 1 menunjukkan bahwa kata “disnakerperin” muncul sebanyak tujuh kali dari jawaban informan dengan persentase sebesar 24,14%. Kemudian diikuti oleh kata “pelatihan” yang muncul sebanyak enam kali dengan persentase 20,69%. Selanjutnya, kata “berhasil”, “koordinasi”, dan “promosi” masing-masing muncul sebanyak tiga kali dengan persentase 10,34%. Kata “penilaian” dan “perizinan” masing-masing muncul sebanyak dua kali dengan persentase 6,9%. Serta kata “akses pasar”, “kaji ulang”, dan “sentra kampung rendang” masing-masing muncul sebanyak satu kali dengan persentase 3,45%.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat 10 faktor pendorong implementasi kebijakan OVOP di Kampung Rendang Kota Payakumbuh berdasarkan perspektif pembuat kebijakan. Tema umum komunikasi menghasilkan dua tema khusus yaitu “koordinasi” dan “sentra kampung rendang”. Lalu, tema umum sumber daya menghasilkan empat tema khusus yaitu “pelatihan”, “promosi”, “perizinan”, dan “akses pasar”. Kemudian, tema umum disposisi menghasilkan dua tema khusus yaitu “berhasil” dan “kaji ulang”. Serta tema umum struktur birokrasi juga menghasilkan dua tema khusus yaitu “disnakerperin” dan “penilaian”.

Faktor Pendorong Implementasi Kebijakan OVOP di Kampung Rendang Kota Payakumbuh: Perspektif Industri Kecil Menengah (IKM) Rendang



Gambar 2. Keywords II

Berdasarkan gambar 2, peneliti mendapatkan kata “peninjauan” sebagai kata yang paling banyak diucapkan oleh informan. Penjabaran komposisi kata-kata yang paling sering diucapkan oleh informan akan disajikan secara lengkap pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Word Count II

Word	Length	Count	Weighted Percentage (%)
Peninjauan	10	5	25
Pameran	7	4	20
Pendampingan	12	3	15
Pendataan	9	3	15
Dipermudah	10	2	10
Adil	4	1	05
Puas	4	1	05
Terbantu	8	1	05

Sumber: Hasil pengolahan kata menggunakan Nvivo 12 Plus, 2024

Tabel 2 menunjukkan bahwa kata “peninjauan” muncul sebanyak lima kali dari jawaban

informan dengan persentase sebesar 25%. Kemudian diikuti oleh kata “pameran” sebanyak empat kali dengan persentase 20%. Selanjutnya kata “pendampingan” dan “pendataan” masing-masing muncul sebanyak tiga kali dengan persentase 15%. Kata “dipermudah” muncul sebanyak dua kali dengan persentase 10%. Serta kata “adil”, “puas”, dan “terbantu” masing-masing muncul sebanyak satu kali dengan persentase 5%.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat delapan faktor pendorong implementasi kebijakan OVOP di Kampung Rendang Kota Payakumbuh berdasarkan perspektif IKM Rendang. Tema umum komunikasi menghasilkan dua tema khusus yaitu “pendataan” dan “peninjauan”. Lalu, tema umum sumber daya juga menghasilkan dua tema khusus yaitu “pendampingan” dan “pameran”. Kemudian, tema umum disposisi menghasilkan dua tema khusus yaitu “puas” dan “terbantu”. Serta tema umum struktur birokrasi juga menghasilkan dua tema khusus yaitu “dipermudah” dan “adil”.

Analisis Faktor Pendorong Implementasi Kebijakan OVOP di Kampung Rendang Kota Payakumbuh

Hasil pernyataan dinas yang bertanggung jawab sebagai pembuat kebijakan terhadap implementasi kebijakan OVOP di Kampung Rendang Kota Payakumbuh ditinjau dari indikator komunikasi sudah berjalan baik. Penyampaian dan koordinasi informasi terkait implementasi kebijakan OVOP di Kampung Rendang Kota Payakumbuh dilakukan bersama dinas koperasi dan UMKM, dinas tenaga kerja dan perindustrian (disnakerperin), kominfo, serta dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda). Informasi secara umum sudah disampaikan dengan baik, namun masih perlu untuk dikoordinasikan secara efektif lagi. Koordinasi informasi juga dilakukan oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP) Kota Payakumbuh. DPTSP memiliki tugas dalam menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Perusahaan Rumah Tangga (PRT), dan izin halal.

Selain itu, koordinasi informasi juga dilaksanakan bersama Industri Kecil Menengah (IKM) OVOP yang berada di Kampung Rendang dan IKM lainnya di Kota Payakumbuh. Informasi lengkap mengenai OVOP di Kampung Rendang dipegang penuh oleh dinas tenaga kerja dan perindustrian (disnaker). Koordinasi informasi mengenai kebijakan OVOP ini dilakukan bersama kemenperin provinsi dan dinas perindustrian perdagangan (perindag) provinsi Sumatera Barat. Namun, dalam pelaksanaannya dinas provinsi tidak pernah melakukan pembinaan bagi IKM yang mendapat bintang satu dan dua dalam praktek penilaian OVOP. Ini merupakan salah satu bentuk praktek kerja yang gagal dalam suksesi pelaksanaan OVOP di Kampung Rendang itu sendiri. Disnakerperin akan meninjau sebanyak dua kali dalam satu tahun. Dalam praktek yang sebenarnya, disnakerperin akan meninjau mengenai kelayakan lokasi atau tempat dari sentra Kampung Rendang itu sendiri, pembukuan ataupun laporan laba dan rugi, serta perizinan usaha. Dari sini didapatkan IKM yang layak untuk dipromosikan di tingkat nasional.

Hasil pernyataan dinas yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan OVOP di Kampung Rendang Kota Payakumbuh ditinjau dari indikator sumber daya sudah berjalan baik. Tujuan awal didirikannya OVOP di Kampung Rendang sendiri memang untuk mengembangkan IKM-IKM rendang. Salah satu langkah yang dilakukan disnakerperin bersama dinas lainnya adalah dengan mengadakan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan kepada setiap IKM. Pelatihan tersebut dikomandoi oleh praktisi, mentor, dan tenaga ahli yang mahir di bidang masing-masing. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata pemberdayaan IKM rendang belum mampu memfasilitasi semua IKM rendang yang ada di Kota Payakumbuh. Sentra Kampung Rendang hanya diisi oleh IKM-IKM yang berada di Kecamatan Latina saja. Hal ini tentu membuat IKM-IKM lain yang berada diluar Kecamatan Latina merasa seperti dianaktirikan. Mereka merasa tidak mendapat perhatian yang sama oleh dinas terkait. Padahal mereka sendiri juga memiliki keinginan yang besar untuk dapat bergabung ke dalam sentra OVOP di Kampung Rendang.

Pelaksanaan OVOP juga didorong kesuksesannya oleh dinas pariwisata. Dinas pariwisata juga menghadirkan mentor ataupun praktisi dalam bidang promosi terutama menciptakan kemasan produk dengan menarik. Hal ini penting karena kemasan menjadi penciri produk yang pertama kali diperhatikan konsumen. Konsumen tentunya akan tertarik pada produk dengan kemasan yang unik dan sudah mencakup informasi dari produk itu sendiri dengan lengkap. Selain pembinaan kemasan, IKM rendang juga diberi wadah oleh dinas pariwisata untuk mempromosikan produk-produknya melalui kegiatan pameran di tingkat nasional. Pameran menjadi salah satu wadah potensial untuk memperkenalkan produk olahan rendang kepada khalayak luas. IKM rendang yang ikut dalam kegiatan pameran ternyata mengharapkan penghargaan berupa piagam atas partisipasi mereka yang diikuti IKM terbaik terpilih di seluruh Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, pameran sepertinya dapat diikuti oleh tim yang sama dari tahun sebelumnya dengan pertimbangan kualitas yang bagus. Disini, IKM-IKM rendang berharap agar pameran yang diadakan di tingkat nasional dapat dilaksanakan dua hingga tiga kali dalam setahun agar semua IKM memiliki kesempatan yang sama untuk mempromosikan produk mereka.

Kemudian, Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) memiliki tugas dalam menangani masalah perizinan usaha dari IKM-IKM rendang yang ada di Kampung Rendang. DPM-PTSP berkoordinasi dengan nakerperin dan dinas koperasi-UMKM untuk mengurus perizinan usaha dari IKM-IKM rendang tersebut. Perizinan juga sangat penting karena dapat memberikan jaminan akan kualitas produk dan kelayakan lokasi tempat produksi dilakukan. Yang terpenting lainnya dalam pelaksanaan OVOP di Kampung Rendang adalah memberikan IKM-IKM rendang akses ke pasar dalam artian mewadahi IKM-IKM tersebut untuk menemukan target konsumen ataupun pelanggan. Untuk IKM dengan

skala besar lebih menargetkan pasar ekspor dan sebaliknya bagi IKM dengan skala kecil lebih difokuskan untuk memenuhi pasar lokal dan nasional. Secara garis besar, dinas-dinas terkait diatas telah memberikan bantuan bagi IKM-IKM yang berada di sentra Kampung Rendang. Bantuan tersebut ada yang berwujud berupa mesin pengolah daging dan bantuan modal serta bantuan tidak berwujud berupa pendampingan, pembinaan, pelatihan, dan mentoring. Namun, salah satu bantuan yang sampai saat ini masih dinantikan IKM-IKM rendang adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Tidak terdapat kepastian kapan dan bagaimana perkembangan pembinaan dan bantuan HKI tersebut.

Hasil pernyataan dinas yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan OVOP di Kampung Rendang Kota Payakumbuh ditinjau dari indikator disposisi/sikap juga sudah berjalan baik. Pelaksanaan OVOP di Kampung Rendang cukup berhasil yang ditandai dengan meningkatnya omset penjualan dan kunjungan wisatawan ke Kota Payakumbuh terutama ke Kampung Rendang sendiri. Produksi harian olahan rendang meningkat dari sebelumnya karena kegiatan produksi sudah tersistemasi dengan baik. Penggunaan mesin canggih dalam pengolahan daging untuk rendang adalah satu impact terbesar yang dirasakan ole sentra Kampung Rendang karena dinilai lebih efisien. Selain itu, IKM-IKM rendang juga sudah melakukan ekspansi usaha secara besar-besaran salah satunya dengan akses pasar yang lebih luas sampai ke luar negeri melalui kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor bahkan sudah dilakukan sampai ke Eropa dan Amerika. Ini merupakan kesuksesan tersendiri bagi sentra Kampung Rendang. Namun, memang jika ditinjau lebih dekat, IKM-IKM rendang yang diberi peluang untuk melakukan ekspor ini hanya yang berlokasi di Kecamatan Latina saja. Selain mereka juga termasuk dalam sentra Kampung Rendang, mereka juga memiliki kualitas dan kuantitas yang memenuhi permintaan pasar ekspor itu sendiri.

Hasil pernyataan dinas yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan OVOP di Kampung Rendang Kota Payakumbuh ditinjau dari indikator struktur birokrasi juga sudah berjalan baik. Program OVOP sendiri memang dinaungi oleh dinas tenaga kerja dan perindustrian (disnakerperin). Disnakerperinlah yang memainkan peranan penting dalam menjamin keberlangsungan program OVOP di Kampung Rendang Kota Payakumbuh. Namun dalam pelaksanaannya disnakerperin dibantu oleh beberapa pihak seperti dinas koperasi dan UMKM yang menaungi data IKM rendang, dinas pariwisata yang menaungi bagian promosi, dinas PM-PTSP yang menaungi modal dan perizinan usaha, kominfo, serta asosiasi pengusaha rendang itu sendiri. Dinas-dinas ini saling bersinergi satu sama lain untuk mensukseskan keberadaan sentra Kampung Rendang ini. Dalam pelaksanaannya, OVOP akan ditinjau dan dipantau secara berkala oleh disnakerperin Kota Payakumbuh yang mana kinerjanya akan dinilai oleh kemenperin di tingkat pusat. IKM-IKM yang dirasa berpotensi untuk dilombakan di tingkat pusat dipilih secara selektif dengan kriteria-kriteria yang sudah

ditentukan. Ini menjadi pemupuk semangat tersendiri sebenarnya bagi IKM-IKM lainnya yang mana jika mereka mampu menunjukkan performa bagus maka akan sangat memungkinkan mereka akan jadi market leader atau pemimpin pasar produk olahan rendang nantinya. Dalam pelaksanaannya juga ditemukan bahwa IKM-IKM rendang di sentra Kampung Rendang diberikan kemudahan dalam mengurus berkas-berkas yang dibutuhkan. Bahkan koordinator sentra Kampung Rendang dan disnakerperin dapat dikatakan sangat tanggap dalam melayani IKM-IKM rendang dalam mengurus berkas-berkas tersebut. Hal ini dinilai sangat positif karena antara dinas terkait sebagai pembuat kebijakan dapat saling bersinergi dengan IKM-IKM rendang sebagai penjalan kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis data, maka disimpulkan bahwa secara umum, penyaluran bantuan dan pembinaan kepada IKM di Kampung Rendang sudah baik, dengan Disnakerperin dan dinas terkait berperan dalam pelatihan, akses pasar, dan perizinan usaha. Namun, masih ada kekurangan dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Program OVOP di Kampung Rendang menunjukkan hasil positif dengan peningkatan omset dan ekspansi ke pasar ekspor. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperbanyak sampel, menggunakan teori implementasi kebijakan yang lebih mutakhir, serta mengadopsi metode campuran (mix method) untuk hasil yang lebih komprehensif

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, M. (2018). Using visual data in qualitative research (Vol. 5): Sage.
- Braun, V., & Clarke, V. (2012). Thematic analysis. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Fitri, A. (2022). Implementasi Program One Village One Product (OVOP) Dalam Membangun Ekonomi Lokal Di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto. *UNES Journal of Swara Justisia*. Volume 5, Issue 4, Januari 2022. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i4.232>.
- Juhari. (2019). Strategi Pengembangan Produk Unggulan yang Berbasis OVOP (Studi Kasus Pada UMKM di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). *JEM: Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang*, Vol 5, No. 1, Edisi Juli 2019, hal 84-91.
- Kemenperin.go.id. One Village One Product (OVOP).
- Khairul, A. (2018). Gerakan OVOP di Kota Banda Aceh: Identifikasi Potensi Produk Industri Kreatif sebagai Produk Unggulan Gampong. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, Vol.7, No.2, hal 201.
- Murti, E. & Harianto. (2019). Pendekatan One Village One Product (OVOP) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa. *Seminar Nasional Sistem Informasi 2019*, 19 September 2019 Fakultas Teknologi Informasi-UNMER Malang. SENASIF 2019.
- Nuriyani, G. & Mia. (2022). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut.

Ode, L., Elwan, M., Kadir, A., Rezkiawaty, S. U., & Qomariyah, E. (2023). Implementation of Covid-19 Budget Policy in Southeast Sulawesi (Case Study of Budget Refocussing and Reallocation of Regional Revenue and Expenditure Budgets 2020). *Journal of Governance and Public Policy*, 10(3), 234-252. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16108>

Peraturan menteri perindustrian RI No. 78 tahun 2008 tentang peningkatan efektifitas pengembangan industri UMKM melalui pendekatan OVOP.

Pike, M. (2019). Interviews instead of self-reports investigating cues and questions for the detection of honesty-humility in employment interviews. *powers problem, psychological resistance and cultural barriers*. 62, 150-159.

Ratmono, Hendri, & Yateno. (2016). Pendekatan OVOP sebagai Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Kota Provinsi Lampung. *DERIVATIF Vol. 10 No. 2, November 2016*.

RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kota Payakumbuh tahun 2023-2028.

Setiajatnika E. & Astuti, Y. E. (2022). Potensi Produk Unggulan Daerah dan Strategi Pengembangannya di Kabupaten Kepulauan Aru. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*. Vol XIII No 1, Maret 2022.

Muhammad Elwan, L. O. (2019). PROBLEM BIROKRASI DALAM MENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUNA. *Journal Publicuho*. <https://doi.org/10.35817/jpu.v2i2.7223>

Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. *Journal Publicuho*. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506>

Tabrani & Angkasa W. I. (2021). Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Klaster Inovasi Dalam Rangka Membangun Ekosistem Riset Dan Inovasi di Daerah. Yogyakarta: Nas Media Pustaka